



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



UU PBK & SRG

Diamandemen Agustus 2010

**Rame - Rame Menggali
Transaksi Komoditi**

**IFTI & Asosiasi Tunggal PBK
Segera Terbentuk**

**INATRADE
KEMUDAHAN DUNIA USAHA**



DARI REDAKSI

PEMBACA yang budiman, pertengahan Agustus 2010, ini, kita diberikan keberkahan dan kemuliaan dengan kehadiran bulan Ramadhan. Berpuasa dibulan suci ini menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam *Surah Al-Baqarah, ayat 183*: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa*”

Dan luar biasanya lagi, sejarah seakan kembali ketika berulang pada tanggal 17 Agustus tahun kita merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-65. Pada 65 tahun lalu, Soekarno-Hatta memproklamakan kemerdekaan Indonesia yang juga bertepatan dengan bulan Ramadhan. Dari masa kemerdekaan selama 65 tahun ini, telah begitu banyak kemajuan yang diraih bangsa tercinta ini. Semangat kemerdekaan seakan tak pernah rapuh, mengusung harapan bangsa ke masa depan yang lebih maju.

Mendag, Marie Elka Pangestu, pada 10 Agustus 2010, lalu meresmikan peluncuran layanan INATRADE. Menurut Mendag, layanan on-line INATRADE diharapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan perizinan perdagangan terpadu dari seluruh lini sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja dunia usaha nasional. Dan ditargetkan, pada 2014 proses perizinan sektor perdagangan hanya akan membutuhkan waktu satu atau dua hari saja.

Bappebti disebut sebagai salah satu pilar utama

layanan on-line INATRADE. Sehingga dalam perkembangannya dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan untuk menarik minat investor masuk ke bursa berjangka komoditas domestik. Layanan on-line INATRADE mampu menghemat biaya dan waktu, sehingga dapat meningkatkan daya saing komoditas nasional dan fasilitas perdagangan dalam menghadapi persaingan global.

Peluncuran pelayanan online INATRADE, tentu saja juga disambut hangat para pelaku industri PBK. Proses pelayanan cepat ini setidaknya memangkas jalur birokrasi dan dipastikan akan semakin menambah gairah di dunia bisnis PBK.

Apalagi, per 1 September 2010, ini, sudah dijalankan kewajiban para perusahaan pialang untuk bertransaksi komoditi minimal 5 persen dari total transaksi OTC. Diharapkan, melalui kewajiban ini industri PBK akan semakin semarak lagi.

Dukungan pemerintah dan legislatif pun diharapkan menjadi pemicu perkembangan bisnis ini. Sperti, pada 27 Juli 2010, lalu, Komisi VI DPR dan Bappebti telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang usulan amandemen UU PBK dan UU SRG. Agenda RDP tersebut ternyata dimajukan atas inisiatif DPR. Sehingga cukup menjadi bukti bentuk perhatian para wakil rakyat atas perkembangan industri ini.

Semoga semua pihak akan semakin bersinergi memajukan industri PBK di bumi pertiwi, sehingga kejayaan negeri bukan lagi sekedar mimpi.

Merdeka!!! ▲



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Penasehat/Penanggung Jawab:** Deddy Saleh
Pemimpin Redaksi: Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi: Widianoro, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswanto, Katimin.
Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

9-10
Berjangka

Rame - Rame Menggali
Transaksi Komoditi



21-23
Komoditi



28
KIPRAH

Domingus Alexander
Ambisi Trader Sukses



Laporan Utama **4-8**

- INATRADE Kemudahan Dunia Usaha
- UU PBK & SRG Diamandemen Agustus 2010

Resi Gudang **11-13**

- Pemerintah Kucurkan Rp 36 Miliar
Bangun Gudang SRG

Agenda **14-15**

Aktualita **16-17**

- IFTI & Asosiasi Tunggal PBK Segera Terbentuk
- Ayo Buruan Jadi Anggota BKDI & ISI
- 15 Desember 2010
BBJ Beroperasi di Gedung Baru

Analisa **18**

- Harga Minyak Goreng
Diprediksi Mentereng

Market **19**

- Lelang Tembakau Bremen Pindah ke Deli
- Harga Karet Terus Meroket
- Harga Emas Tetap Panas

Info Harga **20**

Wawasan **24-25**

- Prosedur Pengajuan Persetujuan
Pengelola Gudang SRG

Kolom **26-27**

- Hak Nasabah Pada Pialang Pailit



INATRADE Kemudahan Dunia Usaha

Cepat, Mudah, Tepat. Itulah slogan yang dijanjikan INATRADE, layanan perijinan on-line milik Kementerian Perdagangan. Layanan pengurusan ijin ini dirasakan banyak manfaat bagi pelaku usaha dalam kepastian berusaha dan membuat daya saing serta minat investasi lebih tinggi. Bappebti salah satu unit Kementerian Perdagangan yang telah siap mengimplementasikan program INATRADE.

Menteri Perdagangan pada kesempatan peluncuran layanan perijinan secara on-line Kementerian Perdagangan, pada 10 Agustus 2010, di Jakarta, mengatakan, sistem ini merupakan salah satu pendukung sistem Indonesia National Single Window (NSW).

“Kami mengharapkan INATRADE diharapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan perijinan perdagangan terpadu dari seluruh lini, yang terkait dengan perijinan perdagangan nasional yang modern,” kata Marie Elka Pangestu

Selain itu, dengan dibukanya on-

line INATRADE diharapkan dapat menghilangkan resiko data yang tidak akurat dalam layanan public, tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Marie Elka Pangestu, bahwa hingga tahun 2014 sesuai dengan Rencana Strategis Kemendag, seluruh perijinan yang diterbitkan oleh Kemendag sudah dapat dilakukan secara on-line dan paperless, sehingga diharapkan tidak ada lagi tatap muka antara pelaku usaha dengan pemroses perijinan.

Peluncuran layanan on-line INATRADE ditandai dengan penekanan tombol secara bersama-sama

oleh Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar bersama Sekjen Kemendag, Ardiansyah Parman, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Subagyo, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Deddy Saleh dan Deputi Menko Perekonomian, Bidang Perdagangan dan Industri, Edy Putra Irawady.

PBK & SRG

Pada peluncuran layanan on-line perijinan Kementerian Perdagangan itu, Bappebti merupakan salah satu unit yang siap melakukan melakukakan reformasi perijinan. Di pihak

lain, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri dan Direktorat Perdagangan Luar Negeri.

Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, pada kesempatan tersebut mengatakan, Bappebti menjadi salah satu pilar utama penerapan on-line INATRADE.

"On-line INATRADE ini terintegrasi dengan unit-unit di Kementerian Perdagangan, salah satunya Bappebti yang menjadi pilar utama melalui industri perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang," kata Mahendra.

Dikatakan Mahendra lebih jauh, perizinan diindustri PBK sudah dapat dilayani secara on-line. "Dengan dilakukan secara on-line, dapat meningkatkan pelayanan dan keamanan untuk menarik minat investor masuk ke bursa berjangka komoditi domestik."

Mahendra menambahkan, layanan on-line INATRADE juga mencakup unit-unit lain di Kementerian Perdagangan, yakni di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

"Dengan adanya layanan on-line INATRADE ini, merupakan indikator utama bagi reformasi birokrasi terkait perizinan agar tepat waktu," tegas Mahendra Siregar.

Sementara itu, dalam testimoni-nya Direktur Utama, PT Solid Gold

Berjangka, Iriawan, mengatakan, dengan layanan on-line INATRADE ini, pihaknya terbantu dalam hal proses perizinan.

"Sebelum ada layanan ini, biasanya kami sulit mencari informasi apa saja yang dibutuhkan untuk pengurusan ijin. Tetapi, sekarang kami sudah merasakan kemudahan itu," jelas Iriawan.

Sehingga, tambah Iriawan, dulu ada istilah, "kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah" sudah tidak berlaku lagi dengan adanya sistem pengurusan ijin secara on-line ini.

"Kemudahan itu bukan saja karena sistemnya, melainkan petugas yang melayaninya juga sangat membantu. Kalau dulu, ada dokumen yang kurang, kami sulit menanyakan bagian mana dari persyaratan yang belum terpenuhi. Tetapi sekarang kami malah ditelepon oleh petugas," kata Iriawan.

32 Hari

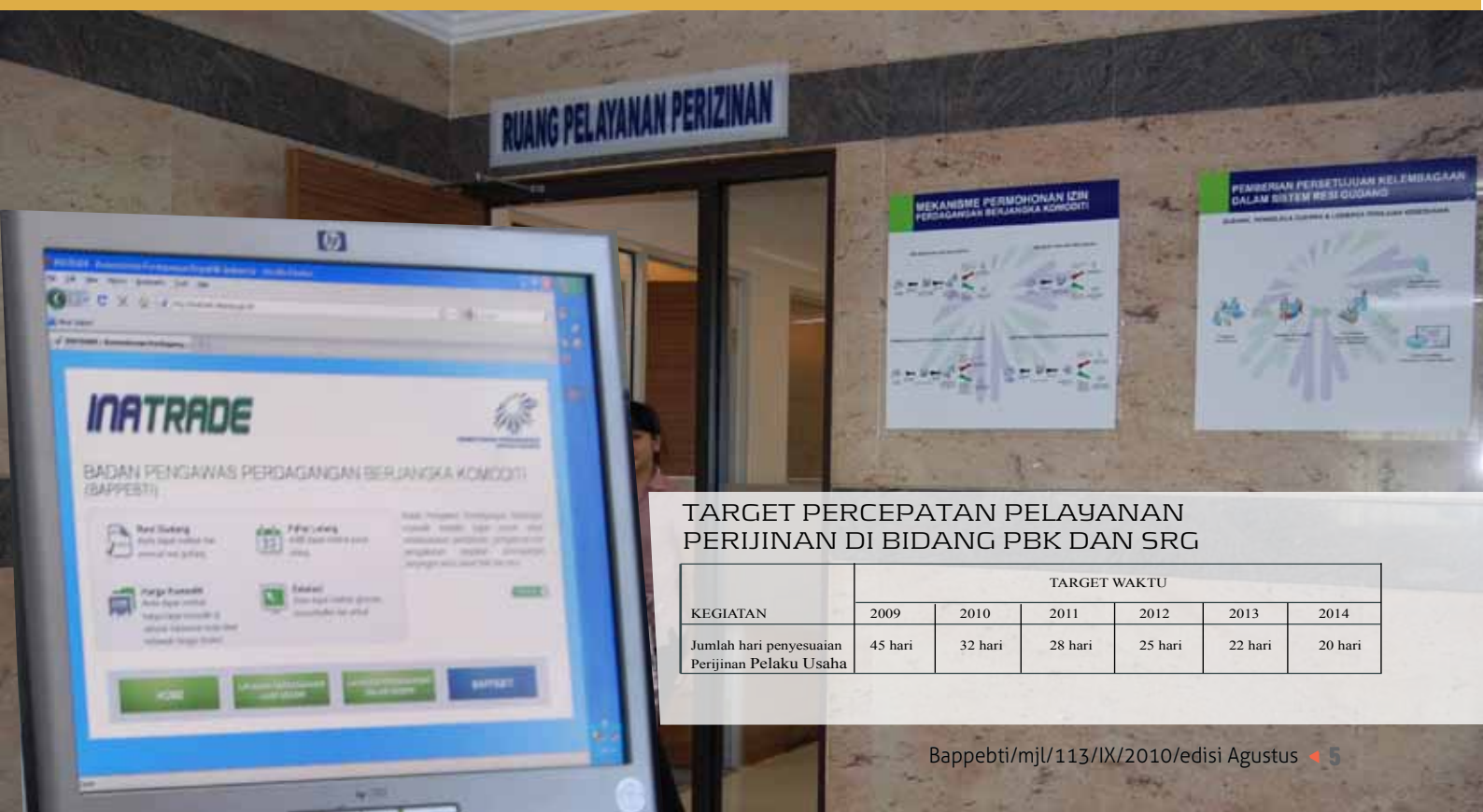
Di pihak lain, Sekjen Kemen dag, Ardiansyah Parman, mengatakan, perijinan yang ada di Kementerian Perdagangan berangsur-angsur masa pengurusan-nya berkurang hingga tahun 2014.

"Target kami pengurusan ijin itu harus bisa lebih cepat. Sebenarnya program ini sudah dimulai dari tahun 2009, namun saat itu belum on-line. Seperti di Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, tahun 2009 pengurusan ijin memakan waktu 7 hari. Tetapi sekarang dengan on-line ini bisa menjadi 6 hari," papar Ardiansyah.

Di sisi lain jelas Ardiansyah, dengan on-line seperti ini, bisa saja ada ijin yang dihapuskan atau digabungkan, sehingga lebih simple. "Karena itu akan lebih memudahkan dunia usaha dalam melakukan aktivitasnya."

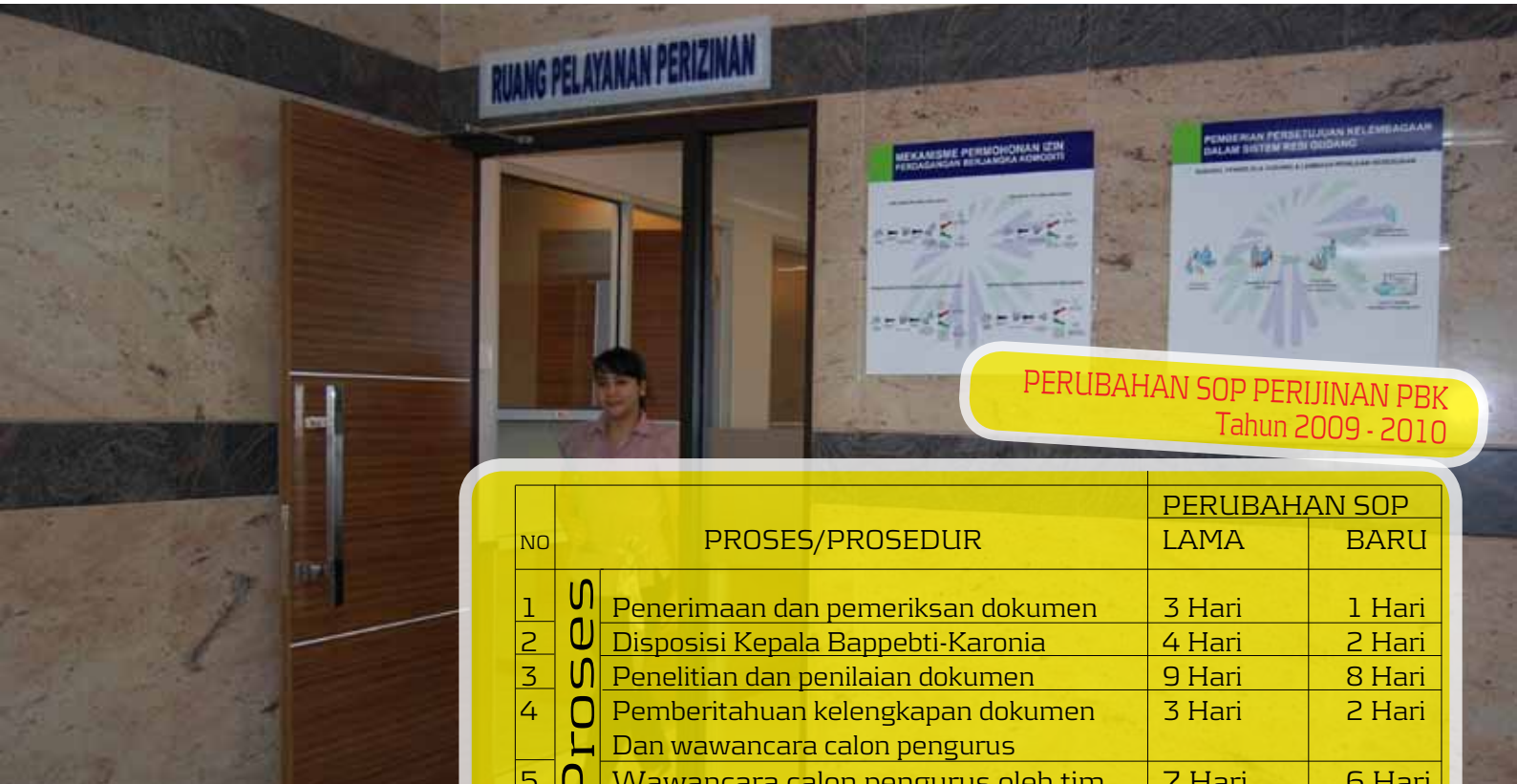
Menurut Ardiansyah Parman, diseluruh unit Kementerian Perdagangan, saat ini terdapat sebanyak 131 perijinan. Dan, hingga tahun 2014 seluruh pengurusan ijin itu dilakukan secara on-line.

"Kecuali perijinan yang ada di Bappebti, tidak seluruhnya bisa dilakukan secara on-line. Karena ada beberapa hal yang bersifat teknis, yang diharuskan dilakukan pemeriksaan secara fisik. Tetapi itu pun masa pengurusan-nya bisa dipercepat. Seperti saat ini, dari 45 hari menjadi 32 hari. Dan ditahun 2014, menjadi 20 hari," terang Ardiansyah. ▲



TARGET PERCEPATAN PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PBK DAN SRG

KEGIATAN	TARGET WAKTU					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah hari penyesuaian Perijinan Pelaku Usaha	45 hari	32 hari	28 hari	25 hari	22 hari	20 hari



**PERUBAHAN SOP PERIJINAN PBK
Tahun 2009 - 2010**

NO	PROSES/PROSEDUR	PERUBAHAN SOP		
		LAMA	BARU	
1	Lama Proses	Penerimaan dan pemeriksian dokumen	3 Hari	1 Hari
2		Disposisi Kepala Bappebti-Karonia	4 Hari	2 Hari
3		Penelitian dan penilaian dokumen	9 Hari	8 Hari
4		Pemberitahuan kelengkapan dokumen Dan wawancara calon pengurus	3 Hari	2 Hari
5		Wawancara calon pengurus oleh tim	7 Hari	6 Hari
6		Pemberitahuan pemeriksaan sarana dan prasarana	3 Hari	2 Hari
7		Pemeriksaan sarana dan prasarana dan rekomendasi oleh tim	10 Hari	8 Hari
8		Pembuatan konsep, penandatanganan dan penyampaian SK dan sertifikat ijin	6 Hari	3 Hari
TOTAL		45 Hari	32 Hari	



Perijinan di BAPPEBTI

1. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (PBK)
 - a. Ijin usaha terdiri dari :
 - 1) Bursa dan Kliring Berjangka
 - 2) Pialang Berjangka
 - b. Ijin : 1) Wakil Pialang.
 - c. Sertifikat pendaftaran : 1) Pedagang Berjangka
 - d. Persetujuan terdiri dari :
 - 1) Bank Penyimpanan Margin
 - 2) Penyaluran Amanat Luar Negeri
 - 3) Penyelenggara dan peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
 - e. Penetapan : 1) Kantor Cabang Pialang Berjangka.
2. SISTEM RESI GUDANG (SRG)
 - a. Persetujuan Gudang dalam Sistem Resi Gudang
 - b. Persetujuan sebagai Pengelola Gudang
 - c. Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
 - d. Persetujuan Pusat Registrasi Gudang

**PERUBAHAN SOP PERSETUJUAN KELEMBAGAAN SRG
Tahun 2009 - 2010**

No	PROSES/PROSEDUR	PERUBAHAN SOP		
		LAMA	BARU	
1	Lama Proses	Penerimaan dan pemeriksian dokumen	3 Hari	1 Hari
2		Disposisi Kepala Bappebti-Karofisa Kepada tim	6 Hari	5 Hari
3		Penelitian dan penilaian dokumen oleh tim	9 Hari	7 Hari
4		Pemberitahuan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan sarana dan prasarana kepada pemohon	8 Hari	4 Hari
5		Pemeriksaan sarana dan prasarana dan rekomendasi tim	11Hari	9 Hari
6		Pembuatan konsep, penandatanganan dan penyampaian SK dan sertifikat	8 Hari	6 Hari
TOTAL		45 Hari	32 Hari	



UU PBK & SRG Diamandemen Agustus 2010

RDP Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perdagangan memutuskan amandemen UU PBK dan SRG segera dilaksanakan pada Agustus 2010. Ditargetkan pembahasan itu selesai hingga akhir tahun, sehingga tahun 2011 sudah siap dioperasikan. Percepatan amandemen itu atas hak inisiatif DPR untuk memajukan agenda pembahasan, semula akan dilaksanakan pada tahun 2011. Tancap!

Menteri Perdagangan yang diwakili Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bersama Komisi VI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan, 27 Juli 2010. RDP yang dibuka Ketua Komisi VI DPR, Erlangga Hartato, dan didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, mengagendakan pembahasan amendemen dua undang-undang yang ada di lingkup kerja Bappebti. Yakni, UU No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan UU No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang (SRG).

Kepala Bappebti, Deddy Saleh, menjelaskan, amendemen UU PBK mulai dibahas tahun ini, atau lebih cepat dari perkiraan sebelumnya yang dijadwalkan mulai tahun 2011. Percepatan ini merupakan inisiatif dari DPR sendiri.

"Tentunya ini sangat menguntungkan, karena amendemen UU No.32/1997 dan UU No.9/2006, sudah mendesak untuk dibahas pada tahun ini. Kami sangat mengapresiasi inisiatif DPR untuk memajukan pembahasan dua UU tersebut," kata Deddy Saleh.

Di lain pihak, Aria Bima, mengungkapkan, ada sejumlah poin-poin penting yang harus dibahas dalam amendemen UU PBK dan UU SRG. Seperti, perlunya

dipertegas sanksi administratif seperti pembatasan kegiatan usaha, kualitas barang pada UU SRG. Sedangkan pada UU PBK, perlu perluasan komoditas sebagai subjek kontrak berjangka pada perdagangan berjangka komoditi.

"Memang kami DPR, yang mengusulkan agar dua UU tersebut segera diamandemen. Karena dua UU itu menyangkut kepentingan investasi masyarakat dan pembiayaan yang bisa membantu para petani. Pada UU SRG, belum ada kepastian hukum baik bagi petani maupun perbankan. Kondisi itulah yang menghambat minat perbankan dalam mendukung instrumen SRG," jelas Aria.

"Pembahasan dua UU itu akan dilakukan setelah masa reses ke tiga DPR. Jadi bulan Agustus nanti, masa persidangan berikut sudah bisa dibentuk Panja," tegas Aria Bima, politikus PDI-P, ini.

Poin Penting

Menurut Deddy Saleh, beberapa poin yang perlu diatur dalam amendemen UU PBK No.32/1997, itu, antara lain, pertama, perluasan pengertian komoditas dan ijin kontrak berjangka dalam UU PBK sudah out of date. Sehingga perlu perubahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perlunya azas perlindungan dan kepastian hukum, sehingga setiap produk yang dijual baik di luar maupun dalam



bursa ada perlindungan hukum juga dapat memperbaiki praktik liar yang selama ini sulit dicegah. Penetapan komoditas sesuai UU 32/1997 harus dengan Keppres juga dinilai tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dalam perkembangan industri PBK yang dinamis. Sehingga, penetapan hanya perlu surat keputusan Kepala Bappebti.

Ketiga, perdagangan berjangka di luar bursa. UU PBK hanya mengatur transaksi di dalam bursa. Praktik PBK di luar bursa yang mengelola dana masyarakat saat ini hanya diatur dengan peraturan kepala Bappebti sehingga memang sudah sangat mendesak untuk diatur melalui UU.

"Dalam KTT G-20 di Pitsburg, Jerman, pada 24-25 September 2009, pemerintah menyepakati untuk melakukan pengaturan pasar derivatif di luar bursa (OTC) secara tepat, transparan dan jelas. Dan, ketentuan itu paling lambat akhir 2012, agar tidak terjadi eksekusi," jelas Deddy.

Keempat, tambahannya, sanksi pidana terhadap praktik kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan dan seminar. "Sebab saat ini, banyak praktik promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar yang dilakukan perusahaan ilegal, belum dapat ditindak secara hukum."

Kelima, demutualisasi bursa berjangka. Perlu segera dilakukan perubahan menjadi bursa yang komersial, sehingga siapapun bisa menjadi pemegang saham bursa untuk mendorong bursa berfungsi dan menghasilkan keuntungan sehingga produknya bisa lebih likuid dan lebih menarik ditransaksikan. Hampir semua bursa di dunia sudah demutualisasi untuk mengembangkan usahanya.

Keenam, pengaturan asosiasi industri perdagangan berjangka. Asosiasi industri berjangka diharapkan dapat berperan strategis untuk membantu perkembangan industri.

Ketujuh, pengaturan transaksi perdagangan berjangka melalui elektronik. Transaksi perdagangan berjangka saat ini harus dapat diakses oleh siapapun dan dari tempat dimana pun selama 24 jam dalam sehari. Penggunaan transaksi elektronik dalam PBK di Indonesia dimungkinkan dengan adanya UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indemnity fund

Sementara itu, pada UU SRG, Deddy Saleh, mengungkapkan, isu pokok yang perlu diamendemen, yakni penambahan pengaturan lembaga baru. Yaitu, lembaga dana jaminan ganti rugi (indemnity fund).

Caranya dengan beberapa langkah, yakni pertama, memperkuat kelembagaan agar SRG dapat dipercaya masyarakat saat menghadapi kemungkinan terjadinya mishandling (salah penanganan) dan apa bila pengelola gudang dinyatakan pailit.

Kedua, menjaga stabilitas dan kredibilitas SRG. Ketiga, sebagai instrumen perlindungan terhadap nasabah apabila terjadi mishandling dan pailit yang paling murah.

"Instrumen indemnity fund semacam sarana asuransi paling murah untuk mengatasi jika ada permasalahan dalam pelaksanaan SRG," jelas Deddy Saleh.

"Hal ini juga merupakan kajian yang dilakukan International Finance Corporation (IFC)- Bank Dunia bekerjasama dengan Bappebti. Ternyata pada UU SRG belum terdapat produk asuransi yang dapat memberikan jaminan dengan ruang lingkup pelaksanaan kewajiban pengelola gudang," tambah Deddy.

Lebih jauh dikatakan Deddy, sebenarnya untuk mengurangi risiko bagi pengelola gudang, komoditi yang tersimpan bisa diasuransikan pada perusahaan asuransi yang bersedia. "Tetapi, timbul persoalan baru. Biaya preminya sangat tinggi dan secara ekonomis tidak layak apabila diterapkan dalam sistem resi gudang di Indonesia."

Oleh karena itu, untuk menyiasatinya, lanjut Deddy, perlu ada mekanisme jaminan pelaksanaan (performance guarantee) SRG yang paling murah dan terjangkau oleh pengguna SRG. Yakni, membentuk dana ganti rugi (guarantee fund).

"Dalam kajian tenaga ahli IFC, dinyatakan untuk membentuk dana ganti rugi harus berdasarkan kekuatan hukum berupa undang-undang. Karena, mewajibkan pengelola gudang untuk menjadi anggota dan membayar iuran," kata Deddy.

Atas usulan IFC tersebut, Bappebti dalam draf amendemen UU No.9/2006 tentang SRG, menambah ketentuan mengenai lembaga dana jaminan ganti rugi dalam Bab IVA. Bab ini terdiri dari pasal 37A sampai 37C. Dalam pasal 37A ayat 1 disebutkan berdasarkan undang-undang ini dibentuk lembaga dana jaminan ganti rugi yang selanjutnya disebut Lembaga Dana Jaminan (LDJ).

Pada ayat 2-4 disebutkan LDJ ini adalah badan hukum, independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LDJ bertanggung jawab kepada presiden. Amendemen UU ini masih dalam taraf pembahasan di DPR. ▲



Rame-Rame Menggali Kontrak Komoditi

Bappebti membekali para pelaku pasar 'ilmu' bertransaksi multilateral kontrak berjangka komoditi. Hal itu guna memenuhi kebijakan transaksi multilateral yang efektif berlaku per 1 September 2010. Pelaku pasar juga diminta menggali lebih banyak lagi teknik transaksi multilateral. Yok, rame-rame kita transaksi multilateral.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 'tidak lepas tangan' membiarkan para pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi terjun bebas transaksi multilateral yang efektif berlaku 1 September 2010. Para pelaku pasar perlu dibekali pengetahuan transaksi berjangka komoditi dengan sistem yang digunakan bursa.

Berkaitan dengan itu, Bappebti menyelenggarakan pelatihan teknis bagi pelaku pasar. Tahap awal pelatihan diselenggarakan di DI Yogyakarta pada 28-29 Juli 2010. Selanjutnya diselenggarakan di Bandung, Jabar, 5-6 Agustus 2010. Demikian antara lain dikatakan Kepala Biro Perniagaan, Bappebti, Retno Rukmawati.

"Pelatihan di Jogja ini diikuti sebanyak 76 perusahaan yang terdiri dari wakil pialang berjangka dan pedagang berjangka. Kami surprise dengan acara ini, karena ternyata banyak juga yang hadir direksi dari perusahaan pialang. Ini menunjukkan keseriusan mereka terhadap kebijakan transaksi multilateral yang efektif berlaku 1 September 2010," jelas Retno.

Untuk memberi pembekalan transaksi multilateral, Bappebti mengundang pembicara dari Direksi Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Kliming Berjangka Indonesia (KBI), Bursa Komoditi dan Derivatif (BKDI), Identrus Security Internasional (ISI) dan praktisi pialang berjangka.

Sementara itu, Kepala Bappebti, Deddy Saleh, dalam sambutannya membuka pelatihan tersebut, mengatakan, sejatinya kontrak berjangka komoditi sama menariknya dengan kontrak keuangan yang diperdagangkan secara bilateral. Hanya saja selama ini belum banyak diperkenalkan.

"Jadi, mulai sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan transaksi kontrak komoditi. Karena, sistem perdagangan bursa sudah siap. Ini soal kebiasaan saja, nanti kalau sudah terbiasa pasti akan menarik," kata Deddy.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh, Bappebti ditugaskan undang-undang untuk mengembangkan perdagangan berjangka komoditi. Makanya kontrak berjangka komoditi harus dijalankan.

"Coba kita renungkan, apa manfaat ekonomis perdagangan bilateral bagi

perekonomian Indonesia? Tidak ada. Tetapi kalau kontrak berjangka komoditi ditransaksikan di bursa, multieffeknya sampai pada petani. Karena petani bisa melakukan perencanaan produksi dengan melihat pergerakan harga di bursa. Bahkan, mereka pun berpotensi ikut bertransaksi di bursa," paparnya.

"Saya akui, sekecil apa pun yang sudah dilakukan pelaku pasar selama ini ada manfaatnya. Menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Tetapi bukan itu tujuan perdagangan berjangka sesuai undang-undang. Tujuannya menciptakan price reference dan hedging," kata Deddy lebih jauh.

"Kembali kesoal kebijakan wajib transaksi multilateral sebesar 5 persen dari total transaksi SPA, saya tidak mau hal itu direayasa. Kalau itu yang terjadi, semakin kerdil industri ini. Seharusnya kita bisa bangga, karena di bursa berjangka secara internasional kita bisa memperdagangkan kontrak komoditi yang dihasilkan bangsa sendiri."

"Jadi saya tidak mau ada rekayasa. Karena 'pak Alfons-Kepala Biro Hukum, dan Ibu Retno-Kepala Biro Perniagaan, nantinya bisa mengetahui hal itu. Dan, mereka pasti akan mempersiapkan sanksinya," tegas Deddy Saleh.



“Inilah tugas bursa mempersiapkan segala sesuatunya yakni desk komoditi, karena komponen berhasilnya multilateral yakni produk dan sistem yang bagus plus kesiapan perusahaan pialang,” jelas Bihar.

Bihar menambahkan, BBJ juga mengadakan pelatihan teknis Revitalisasi Kontrak Multilateral, pada 7 Agustus 2010, di Bandung, Jabar. Acara itu bekerjasama dengan Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Desk Komoditi

Menurut Deddy Saleh, strategi perusahaan pialang memperkenalkan kontrak berjangka komoditi kepada calon investor, perlu dibentuk desk komoditi dimasing-masing perusahaan. Dengan demikian perusahaan pialang bisa fokus menawarkan transaksi multilateral maupun bilateral.

Di samping itu, dengan adanya desk komoditi Wakil Pialang Berjangka yang ditugaskan bisa berfikir kreatif menawarkan kontrak komoditi berjangka. “Karenanya, dalam pelatihan seperti ini, kami minta Wakil Pialang yang dikirim jangan berganti-ganti. Supaya dia bisa mengikuti terus perkembangan,” kata Deddy.

Terkait dengan itu, Direktur BBJ Bihar Sakti Wibawa, mengatakan desk komoditi ini harus ada di setiap perusahaan pialang berjangka. Dari setiap desk komoditi ini, harus menyediakan tiga orang karyawan yang khusus menanganinya yakni terdiri dari head commodity, Wakil Pialang dan pelaksana transaksi (trader).

“Ketiga inilah yang harus ada di setiap perusahaan pialang. Kami ingin konsepnya mereka menilai kewajiban transaksi multilateral minimal 5% bukan pemaksaan. Kami akan bentuk bahwa ini adalah bisnis, kami ingin mereka melakukan kegiatan yang ada hasil dalam beraktifitas,” ujar Bihar.

Bihar menambahkan, BBJ pelan-pelan akan melatih pengetahuan pialang mengenai kontrak multilateral. Jika diukur saat pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir nilainya masih rendah.



Class Komoditi

Sementara itu, terkait dengan kebijakan transaksi multilateral yang efektif berlaku pada 1 september 2010, BKDI juga meluncurkan program class komoditi. Program ini ditujukan untuk memberi pengetahuan transaksi kontrak berjangka komoditi bagi calon investor atau pun masyarakat umum.

Class komoditi BKDI akan mulai dioperasikan pada awal bulan September 2010. Menurut Direktur BDKI, Megain Widjaya, bagi masyarakat umum yang hendak memperkaya pengetahuan tentang kontrak berjangka komoditi akan dilayani secara gratis.

“Kami dengan senang hati menerima masyarakat umum untuk memperkaya pengetahuan tentang perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian masyarakat mengerti manfaat ekonomis perdagangan berjangka,” ujar Megain.

Tetapi katanya lebih jauh, ada baiknya bagi masyarakat umum dilaksanakan berkelompok atau grup.

Setidaknya, setiap kelompok berjumlah 20 hingga 30 orang. Sehingga class komoditi bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Class ini disiapkan secara khusus dengan fasilitas yang terkoneksi dengan sistem perdagangan.

“Program ini juga mendukung perusahaan pialang berjangka anggota BKDI dalam memperdalam pengetahuan tentang transaksi multilateral. Seperti kita ketahui, sejumlah anggota BKDI juga merupakan anggota BBJ. Jadi mereka pun perlu mendapat tambahan pengetahuan dari BKDI,” jelas Megain.

Di samping itu, tambah Megain, class ini juga bisa dimanfaatkan perusahaan pialang anggota BKDI dalam memperkenalkan kontrak berjangka komoditi bagi calon investor.

“Nantinya, kalangan profesi seperti wartawan pun, akan kami undang untuk mengikuti class komoditi. Sehingga ada ketertarikan mewartakan perdagangan berjangka komoditi yang bermanfaat bagi perekonomian,” janji Megain.

‘Nah, siapa lagi yang menyusul peduli dengan perdagangan berjangka komoditi?▲



Pemerintah Kucurkan **Rp 36 miliar** Bangun 12 Gudang SRG

DIPA APBN tahun 2010 untuk pembangunan gudang SRG diserahkan kepada 12 Pemda. Totalnya mencapai Rp 36 miliar. UKP4 juga ikut andil dalam pembangunan gudang SRG diberbagai daerah. Hal itu untuk percepatan implementasi SRG diseluruh daerah.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Deddy Saleh, didampingi Sekretaris Bappebti, Nizarli dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriyono Edi, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, kepada 12 Pemda, untuk biaya proses pembagunan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) diwilayahnya masing-masing. Penyerahan dana pembangunan gudang SRG itu dilaksanakan di gedung Bappebti, 29 Juli 2010.

Dana pembangunan gudang SRG diterima langsung 12 Pemda, yang diwakili masing-masing Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan

dan Koperasi (Disperindapkop) dari masing-masing daerah. Setiap daerah berhak mendapatkan dana sebesar Rp 3 miliar, sehingga total dana yang digelontorkan sebesar Rp 36 miliar.

Kepala Bappebti, Deddy Saleh, dalam sambutannya mengatakan, masih banyak pejabat daerah yang kurang memahami instrument SRG. Hal ini dikarenakan salah komunikasi antara kepala daerah dengan pejabat yang bertugas di bidang ini. Sehingga sering terjadi salah persepsi.

“Tetapi setelah kami berkeliling ke daerah dan bertemu para bupati secara langsung, anehnya mereka malah langsung mendukung penuh,” jelas Deddy.

Sehingga Deddy menilai, ada terjadi kesalahan komunikasi ditingkat kepala dinas terkait, selaku pihak

yang diberikan wewenang penuh dari Bappebti untuk menjelaskan pentingnya pengembangan SRG. Sebab itu, Deddy, berharap, agar 12 daerah yang akan segera membangun gudang SRG tidak melakukan kesalahan serupa.

Kurang Komunikasi

Deddy Saleh, menekankan pentingnya penjelasan yang sebaik-baiknya kepada bupati masing-masing daerah. “Bupati harus tahu jika program ini bermanfaat bagi petani, pengusaha daerah dan semuanya memang untuk daerah tersebut. Apabila para bupati mendapatkan pemahaman secara benar, maka dipastikan program SRG akan lancar berjalan.”

“Jangan sampai kesalahan

yang lalu terulang lagi. Apa yang kita jelaskan nampaknya tidak dipahami para kepala dinas, atau mungkin tidak disampaikan dengan baik. Sehingga tidak ‘merangsang’ Bupati untuk mendukung penuh program ini. Kenapa Bupati yang belum kita temui programnya tidak jalan, tetapi yang telah kita temui malah langsung jalan dan berjalan baik sampai sekarang? Artinya ini ‘kan kesalahan terletak dari cara penyampaian,” terang Deddy.

Ditambahkan Deddy, selama ini keluhan petani dan UKM adalah jika panen melimpah harga komoditi menjadi turun. Biasanya yang disalahkan adalah pihak Depperindag. Tetapi saat ini telah diciptakan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan SRG.

Selama ini jika petani simpan komoditi ke gudang, petani tidak mempunyai gudang. Dengan SRG petani bisa ke bank, mendapatkan kredit yang bunganya telah disubsidi sehingga hanya sekitar 6 persen per tahun. Prosedur pun dibuat sesederhana mungkin. Sehingga dikemudian hari tidak ada lagi kisah petani masih meminjam uang di tengkulak atau ijon.

“Ini sudah dipraktikkan petani di beberapa daerah. Sistem ini pada dasarnya membantu petani, dan diharapkan Pemda mendukung proses pengembangannya. Apalagi kita punya inisiatif untuk sementara ini membebaskan biaya gudang. Jadi ini sekitar satu atau dua tahun petani tidak dipungut biaya sewa. Jika ini sudah berjalan, nanti baru itu diberlakukan. Lagi pula gudang dibangun pemerintah dari uang rakyat. Jadi, memang ini wajar dinikmati rakyat. Sebenarnya dengan gudang ini pun petani tidak perlu membayar sewa tinggi, dan ternyata sudah ada daerah yang membebaskan biaya sewanya,” kata Deddy.

Mengenai gaji pengelola gudang, Pemda selanjutnya akan subsidi sekitar Rp 180 juta saja yang selanjutnya berdampak bagi pendapatan petani. Dan program ini sudah terbukti sukses di berbagai negara. Deddy mengimbau agar Kepala Dinas terkait benar-benar mempelajari SRG.

Sementara yang diharapkan dari Pemda/Bupati adalah menyediakan lahan minimal 3 ribu m² yang terletak di sentra produksi pertanian, atau berjarak sekitar 3 hingga 4 KM. Sehingga barang mudah dibawa ke gudang. Dan yang terpenting, lahan tersebut bukan merupakan lahan sengketa sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari.

UKP4

Deddy juga menegaskan agar Pemda setempat yang diberikan tanggung jawab dan melaksanakan tugas pembangunan gudang RG ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kegiatan ini akan dipantau Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sebab itu, masing-masing Kepala Dinas yang hadir diwajibkan segera memberikan laporan data titik koordinat (LU/LS) paling lambat satu minggu setelah penyerahan DIPA.

Deddy menyarankan para Kepala Dinas nantinya dapat meminta data tersebut ke kantor PU setempat, atau jika dapat menggunakan handphone yang menggunakan GPRS. Sebab data tersebut untuk mempermudah UKP4 memonitor melalui satelit. Selain itu, sangat penting kiranya untuk meyakinkan Bupati/Walikota untuk menyediakan APBD dari sekarang. Sehingga dapat diusahakan APBD untuk penyelenggaraan SRG tahun 2011. Pemda nantinya menyediakan sarana dan prasarana seperti alat timbang, computer, kemudian dana menggaji para pengelola gudang tersebut.

“Ada komitmen dari UKP4, jadi Agustus ini minimal pembangunan gedung telah 10 persen. Memang sangat ketat waktunya, sehingga Kepala Dinas terkait memang perlu mengawasi proses administrasi dan lain-lainnya. Biasanya nanti ada hambatan atau kelemahan yang terjadi dalam prosesnya. Seperti adanya kelambanan dan kualitas fisik,” kata Deddy.

Deddy mengisahkan, Bappebti pernah melakukan “sidak” disuatu daerah. Di mana di wilayah tersebut sedang dilakukan proses pembangunan gudang RG. Tetapi anehnya, proses berjalan lambat. Ternyata Kepala Dinas terkait tidak berani menegur kontraktor pembangunan gedung tersebut, karena pihak kontraktor ada hubungan keluarga dengan Bupati. Sehingga kualitas pembangunan gudang yang jelek pun dibiarkan.

“Jadi tolong diingatkan juga ke Bupati. Tidak jadi masalah jika yang menang tender saudaranya. Namanya juga tender, kita mencari yang terbaik. Dan kalau memang yang terbaik itu kebetulan ada hubungan dengan Bupati ya tidak jadi masalah. Asal

mampu bekerja secara professional, agar tidak merusak nama si Bupati itu sendiri. Jadi jangan dikira pekerjaan yang asal-asalan begitu tidak ketahuan. Ini pasti ketahuan BPK. Jadi dari awal-awal diingatkan. Kita pun diawasi UKP4, jadi bekerjalah dengan baik. Ini ‘kan untuk rakyat, jadi jangan sampai berpikir untuk mengambil keuntungan dari sini!” tegas Deddy.

Masalah kualitas fisik, menurut Deddy, seperti tidak adanya pagar untuk mengamankan gudang RG akan membahayakan aktifitas gudang. Mengingat masalah keamanan juga menjadi salah satu yang harus dipenuhi dari pembangunan gudang tersebut. Apalagi gudang RG yang dibangun harus memenuhi SNI.

Deddy memuji salah satu daerah yang ternyata mampu membangun gedung RG jauh lebih baik dari yang diharapkan. Dengan dana yang dikucurkan, daerah tersebut mampu membangun gudang lengkap dengan kantor hingga mushola. Bahkan rumah penjaga gudangnya jauh lebih bagus dari rumah BTN. Daerah tersebut mampu mengefisienkan dana yang dikucurkan, hingga pelataran parkir gudang tersebut pun dilengkapi pula lampu-lampu merkuri seperti layaknya di mall.

“Jadi itu tergantung Kepala Dinasnya, yang punya kepentingan untuk menunjukkan prestasinya. Kepala Dinas tersebut mengaku kepada saya, dia tidak mengambil serupiah pun dari dana yang telah dikucurkan pemerintah. Sebab dia bertekad untuk memajukan daerahnya. Nah, yang begini yang seharusnya dicontoh! Jangan sampai anda berpikir yang penting anda dapat proyek. Kita harus rubah mind set kita, cara berpikir kita untuk kebaikan bangsa dan negara” pesan Deddy. ▲

Pembangunan Gudang SRG dari APBN-P 2010

1. Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
3. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
4. Kabupaten Way Kanan, Lampung
5. Kabupaten Lebak, Banten
6. Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
7. Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
8. Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
9. Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
10. Kota Palopo, Sulawesi Selatan
11. Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
12. Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Mamuju, Sulawesi Barat, Ramlie Abdullah

Kami sudah sangat siap mengembangkan SRG di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Mengenai lahan, administrasi dan sebagainya tidak ada masalah. Tetapi memang, SRG ini belum kami sosialisasikan secara besar-besaran di sana. Sosialisasi baru dilakukan pada Gapoktan tertentu.

Soalnya, di daerah kami saat ini sedang menghadapi masa pemilihan bupati baru. Kami khawatir jika ini langsung kami gembarkan, dikira hanya janji-janji manis bupati yang sedang ingin mencalonkan diri kembali. Atau, cuma upaya bupati yang ingin meraup suara dari kalangan petani.

Kami tidak ingin begitu, dan mencoba menghindari itu. Jadi, setelah kampanye ini kami akan langsung membangun gudang SRG ini.

Mudah-mudahan dengan pembangunan gudang, pendapatan masyarakat petani meningkat serta tidak terjadi kerusakan lahan. Dulu hasil pertanian di daerah kami menjadi murah waktu musim panen, karena tidak ada yang menampung. Dengan ada SRG 'kan masalah tersebut dapat ditanggulangi.

Di Kabupaten Mamuju, Gapoktan yang ada cukup maju. Apalagi Pemda juga sangat mendukung pengembangan SRG di daerah kami ini. Sekitar 60 persen masyarakat di daerah kami memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dalam arti luas. Pembangunan daerah sejak 5 tahun terakhir ini sangat pesat, dibandingkan kabupaten lain di sekitarnya yang stagnan.

Disperindagkop, Muba, Sumsel, Ihwan Muslimin

Musi Banyuasin (Muba), sekitar 80 persen masyarakat kami berprofesi petani. Pendapatan petani di wilayah kami lumayan tinggi untuk komoditi padi. Petani kami dalam waktu tiga bulan itu bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp 30 juta.

Nah, jika SRG ini jalan di Muba, sudah dipastikan berapa besar keuntungan yang akan diraih petani. Tentu akan jauh lebih besar dari penghasilan selama ini. Saat ini gabah kan hanya dihargai sekitar Rp 2 ribu per kg. Kasihan petani. Mereka berhak mendapatkan lebih. Dengan

Kepala Disperindag, Energi dan Mineral, Pinrang, Sulawesi Selatan, Armin Sanusi

Lahan pertanian yang dimiliki Kabupaten Pinrang terbesar di Sulsel, yakni seluas 48 ribu hektar. Selain padi, kami juga punya komoditas unggulan seperti kakao, kopi dan rumput laut.

Kami berharap SRG ini mampu mengatasi permasalahan petani. Dulu petani yang punya gabah, karena sedang panen harga anjlok. Tetapi dengan SRG, petani bisa tahan gabah hingga masalah harga bisa diatasi.

Untuk skema ini kami akan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Sulsel dan BRI.

Untuk persiapan, kami sudah gerak cepat. Gudang tersebut diperkirakan

selesai 10 Desember 2010, ini. Jadi, kami mulai bergerak sejak 1 Agustus. Kami akan membangun gudang SRG ini di lokasi tepat di tengah sentra produksi. Diapit hamparan sawah, dengan sarana dan prasarana lengkap, seperti listrik, air dan transportasi.

Untuk pengelola gudang, kami ambil dari staf sendiri. Namun sebelumnya akan dilatih yang bekerjasama dengan Sucofindo.

Kita udah mempersiapkan 5 staf di bidang perdagangan untuk menjadi pengelola gudang. Jadi istilahnya kita efisiensi biayalah. Dari pada harus menggaji orang lagi, mending yang ada saja kita berdayakan.



Kepala Disperindagkop Purwakarta, Jabar, Endang Koswara

Dengan dana yang dikururkan pemerintah sebesar Rp 3 miliar, ini, saya rasa cukup untuk membangun gudang SRG. Kalau masalah lahan kita tidak jadi masalah. Kita sudah siap untuk menjalankan program SRG ini.

Petani dengan adanya SRG ini nantinya kan mampu menghasilkan nilai produksi yang menjanjikan. Ini kan akhirnya bermuara kepada peningkatan pendapatan petani di Purwakarta. Sebab itu petani kita sangat antusias menyambut program ini.

Di Purwakarta, selain padi kami punya produk unggulan lain seperti buah manggis. Produksi buah manggis Purwakarta selain memasok kebutuhan local juga diekspor.

disimpan di gudang RG nanti, pasti petani kita akan lebih bersemangat lagi.

Petani sudah sangat antusias sekali menyambut SRG ini hadir di Muba. Usaha masyarakat sekitar kan umumnya hanya tanaman padi. Meski kita juga ada walet dan kopra yang juga berpotensi tinggi. Tetapi memang untuk saat ini yang menonjol sekali adalah padi dan jagung.

Jadi, optimisme untuk keberhasilan SRG di Muba saya yakini bukan mimpi. Dengan kerja sama dari semua pihak, saya yakin kita dapat mewujudkan impian petani dan memajukan wilayah kami.

▶ AGENDA ◀



Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu didampingi Wamendag Mahendra Siregar dan Sekjen Kemendag Ardiansyah Parman, memberi keterangan pers peluncuran layanan perijinan on-line INATRADE. Layanan on-line ini ditujukan untuk mempermudah dunia usaha dalam prosedur perijinan. Bappebti salah satu unit Kemendag yang siap melayani perijinan secara on-line. 10 Agustus 2010



Kepala Bappebti, Deddy Saleh bersama Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menandatangani nota kesepahaman bersama dalam kaitan pengembangan dan percepatan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Aceh. Penandatanganan dilakukan di Banda Aceh yang dihadiri oleh pejabat lingkungan Bappebti, unsur Muspida Aceh dan Dirut KBI, Surdiyanto Suryodarmodjo. Dihari yang sama Kepala Bappebti, Deddy Saleh, membuka sosialisasi SRG di Banda Aceh. Dalam sambutannya, Kepala Bappebti mengharapkan di Provinsi Banda Aceh segera dapat diimplementasikan skema SRG mengingat Banda Aceh memiliki potensi komoditi yang dapat diresi gudangkan yaitu beras dan kopi. Rabu 4 Agustus 2010.



Menteri Perdagangan diwakili Kepala Bappebti, Deddy Saleh, menghadiri undangan Komisi VI DPR RI, dalam kaitan amandemen dua undang-undang yang berada diunit kerja Bappebti. Undang-undang tersebut Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang Sistem Resi Gudang. Kedua undang-undang tersebut direncanakan pembahasannya pada bulan Agustus 2010 dan ditargetkan selesai himgga akhir tahun. 27 Juli 2010



Kepala Bappebti Deddy Saleh menyerahkan DIPA APBN 2010 kepada 12 Pemda untuk pembangunan gudang SRG. Nilai pembangunan 12 gudang SRG tersebut sebesar Rp. 36 miliar. Ditargetkan gudang SRG itu rampung ditahun 2010. 29 Juli 2010



Kepala Bappebti Deddy Saleh membuka pelatihan teknis pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi di Yogyakarta, 28-29 Juli 2010. Pelatihan ini membekali pelaku usaha dalam bertransaksi multilateral perdagangan berjangka. Pembicara dalam pelatihan itu berasal dari BBJ, BKDI, KBI, ISI, dan praktisi perdagangan berjangka. Acara yang sama juga dilakukan di Bandung, Jabar, 5-6 Agustus 2010.



Kepala Bappebti, Deddy Saleh membuka acara Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam sambutannya Kepala Bappebti menyampaikan perlu penerapan pedoman perilaku Pialang Berjangka untuk memperbaiki citra dan meningkatkan performa Perdagangan Berjangka Komoditi. Acara dihadiri oleh 60 orang peserta yang merupakan perwakilan dari 15 kantor cabang di wilayah Kalimantan. 7 Agustus 2010

IFTI & Asosiasi Tunggal PBK Segera Terbentuk

Guna meningkatkan minat investasi masyarakat dibidang perdagangan berjangka komoditi, dianggap penting hadirnya sebuah institusi yang memberi pengetahuan dan manfaat instrumen perdagangan berjangka komoditi. Institusi tersebut nantinya berada dibawah naungan asosiasi industri perdagangan berjangka komoditi.

Menurut Kepala Biro Hukum, Bappebti, Alfons Samosir, masyarakat Indonesia saat ini masih sangat terbatas mengetahui bidang perdagangan berjangka komoditi. Kalau pun sudah ada masyarakat yang memilih berprofesi dibidang perdagangan berjangka diperoleh dari belajar secara otodidak. Pada hal instrumen ini sangat penting perannya bagi perekonomian nasional.

"Tidak ada satu pun saat ini institusi pendidikan formal yang memberi pengetahuan tentang perdagangan berjangka komoditi. Pada hal, negara kita ini sangat kaya dengan berbagai macam komoditi yang diperdagangkan secara internasional melalui bursa berjangka. Inikan aneh, kita yang punya barang tetapi negara asing yang memperdagangkannya," papar Alfons.

Memang Indonesia sudah memiliki dua bursa berjangka komoditi, tetapi bila dibandingkan negara lain masih jauh tertinggal, katanya.

IFTI
Bappebti menganggap institusi pendidikan itu penting dalam sebuah industri perdagangan berjangka komoditi. Karena, mereka pun nantinya bisa melakukan berbagai macam penelitian dan pengembangan kontrak komoditi yang akan diperdagangkan bursa berjangka. Di samping itu, institusi tersebut bisa dijadikan corong sosialisasi. Oleh karena itu keberadaanya dibawah naungan asosiasi.

"Undang-undang perdagangan berjangka komoditi yang ada saat ini memang belum menegaskan asosiasi untuk melakukan hal tersebut. Tetapi dalam waktu dekat ini 'kan UU tersebut akan diamandemen oleh DPR RI. Jadi, secara simultan kita sudah dorong pelaku pasar untuk mendirikan institusi tersebut," ujar Alfons.

"Nantinya pun, kita hanya akan mengenal ada satu asosiasi diindustri perdagangan berjangka komoditi. Kita pun belum tahu nanti apa nama dari asosiasi tersebut. Tergantung para pelakunya saja," jelas Alfons.

Dalam benak saya, seloroh Alfons, nama dari institusi pendidikan itu Institusi Futures Trading Indonesia. Atau disingkat IFTI.

"Sebenarnya sudah ada pihak swasta yang mau menginvestasikan dananya untuk mendirikan lembaga pendidikan itu. Tetapi mereka masih menunggu payung hukum yang lebih kuat," kata Alfons.

Asosiasi Tunggal

Sementara itu, Kepala Bappebti, Deddy Saleh, mengatakan, asosiasi tunggal industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia diharapkan sudah dapat berdiri sebelum amandemen UU No. 32/1997, selesai. Bentuk organisasi asosiasi tersebut terdiri dari badan eksekutif dan pengusur harian. Badan eksekutif disisi oleh tokoh-tokoh publik yang berkompeten. Sedangkan pengurus harian bisa siapa saja dari kalangan pelaku pasar dan masyarakat umum.

"Sehingga, ketika amandemen tersebut sudah rampung dibahas bersama DPR RI, asosiasi itu sudah bisa langsung berperan sesuai dengan amanat undang-undang yang diamandemen," jelas Deddy.

Namun, kata Deddy Saleh, kami saat ini masih berfikir siapa yang akan membentuk asosiasi tersebut. Apakah pelaku pasarnya sendiri, atau Bappebti yang menunjuk orang-orangnya.

"Kalau diserahkan pada pelaku pasar tidak bakal jadi-jadi. Karena mereka sendiri sibuk mengurus perusahaan masing-masing. Tetapi kalau Bappebti yang menunjuk, nanti dikirain ada kepentingan macam-macam."

"Tetapi asosiasi ini sangat penting segera terbentuk. Kami harapkan sebelum tahun depan asosiasi itu mesti sudah ada. Soal siapa membentuk asosiasi itu pasti nanti ada solusinya. Dan, hal itu akan dibicarakan lagi dengan para pelaku pasar dalam waktu dekat," tegas Deddy Saleh. ▲

15 Desember 2010

BBJ Beroperasi di Gedung Baru

RUPS BBJ yang diselenggarakan pada 27 Juli 2010, di Jakarta, menghasilkan keputusan penting bagi masa depan dan kelanjutan bursa berjangka pertama di Indonesia, itu. Salah satu keputusan penting RUPS tersebut, BBJ disetujui pindah tempat dan membeli satu lantai seluas 1.500 m di gedung The City Tower, di kawasan MH. Thamrin, Jakarta.

Menurut Direktur BBJ, Bihar Sakti Wibowo, dengan disetujuinya BBJ

memiliki gedung, akan mendukung pencitraan bursa di mata masyarakat dan khususnya investor. "Gedung yang sekarang ditempati sudah tidak layak lagi untuk pengembangan BBJ ke depan. Oleh karena itu, disusulkan agar pindah tempat dan sekaligus membangun pencitraan yang lebih positif."

"Ini satu hal yang pantas disyukuri. Karena, diawal tahun 2011, nanti, BBJ akan beroperasi dengan semangat baru dan kekuatan penuh.

Jajaran direksi baru, dan sistem perdagangan multilateral sudah bisa dioperasikan pada September 2010, ini," katanya.

Ditargetkan gedung yang dibeli seharga Rp 42 miliar itu, akan siap ditempati pada 15 Desember 2010.

"Kami sudah menancangkan pada 15 Desember 2010, gedung tersebut akan siap ditempati. Mengingat pada saat itu persis 10 tahun BBJ beroperasi. Nantinya BBJ akan menempati lantai 20 dari gedung tersebut," jelas Bihar. ▲

Ayo, Buruan

Jadi Anggota BKDI & ISI

Batas akhir masa promosi menjadi anggota Bursa Komoditi dan Derivatif (BKDI) dan lembaga kliring Identrus Security International (ISI) yakni 31 Agustus 2010. Dalam masa promosi tersebut, perusahaan pialang atau pedagang berjangka diringankan syarat pendaftaran yang hanya menyeter dana pendaftaran sebesar Rp 100 juta. Dengan dana sebesar itu, pelaku pasar sudah menjadi anggota BKDI dan sekaligus anggota ISI.

"Masa promosi menjadi anggota sudah diberlakukan sejak BKDI dan ISI memperoleh izin operasi dari otoritas perdagangan berjangka

komoditi. Dan, batas akhirnya pada 31 Agustus 2010. Lewat dari tanggal yang ditentukan tersebut, kami menetapkan syarat sebagaimana yang ada pada peraturan BKDI dan ISI," jelas Dirut BKDI, Megain Widjaya.

Untuk menjadi anggota BKDI dan ISI mulai per 1 September 2010, tambah Megain, biaya pendaftaran menjadi Rp 300 juta. "Ini kesempatan yang baik bagi pelaku pasar perdagangan berjangka untuk menjadi anggota BKDI dan ISI."

Menurut pengakuan Megain Widjaya, saat ini pun ada sebanyak sepuluh perusahaan yang sedang

dalam proses memperoleh izin menjadi anggota BKDI dan ISI. Sedangkan saat ini anggota BKDI sudah mencapai sebanyak 17 perusahaan, terdiri dari 12 pedagang berjangka dan 5 pialang berjangka. Dengan tambahan itu, nantinya anggota BKDI menjadi 27 perusahaan.

"Dengan tambahan anggota tersebut, kami optimis pasar akan lebih dinamis," ujarnya.

Jadi apalagi yang harus dipertimbangkan? Ayo, buruan menjadi anggota BKDI dan ISI, bila ingin tetap eksis pada industri perdagangan berjangka komoditi. ▲

Harga Minyak Goreng Diprediksi Mentereng

Harga minyak goreng sedang *ngejreng*. Hal ini antara lain didorong kenaikan harga CPO. Di tanah air, kondisi harga minyak goreng kian meninggi mengingat saat ini sedang masa bulan Ramadhan dan sebentar lagi akan disusul Hari Raya Idul Fitri.

Kenaikan harga CPO dunia akhirnya memang mendongkrak harga minyak goreng dengan sempurna. Kondisi ini berimbas pula kepada meroketnya harga minyak goreng yang beredar di pasaran lokal. Lonjakan harga komoditi ini tampak jelas terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Sejumlah pihak meyakini, lonjakan harga tersebut akan terus mapan terjadi mengingat saat ini sedang bulan Ramadhan dan menjelang lebaran.

Seperti di Batam, harga minyak goreng saat ini sudah mencapai Rp 9.500 per kilogram. Menurut Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber daya Mineral Kota Batam Ahmad Hijazi, kenaikan harga ini tidak terlepas dari naiknya harga CPO. Harga CPO dunia yang terus naik hingga US\$930 per metrik ton, membuat harga minyak goreng di pasar meroket tajam. Karenanya Pemda setempat tidak dapat mengatasi gejala kenaikan harga tersebut.

Ahmad Hijazi tidak setuju jika kenaikan harga minyak goreng karena faktor inflasi menjelang Ramadhan hingga Lebaran. Meski demikian, Ahmad Hijazi, memastikan pasokan minyak goreng di wilayah Batam masih mampu diandalkan hingga Idul Fitri tiba. Menurutnya, kebutuhan minyak goreng warga Batam mencapai sekitar 1.080 ton per bulan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Medan, Sumur. Kenaikan harga CPO menyebabkan harga minyak goreng dipabrikasi ikut melonjak hingga mencapai Rp 8.675 per kg dari harga sebelumnya Rp 8.425 per kg.

Sementara itu, dari Semarang, Jateng, harga minyak goreng nampak "balapan" dengan sejumlah komponen bahan pokok lainnya seperti beras dan gula. Permintaan minyak goreng di wilayah ini sedang derasny, sehingga terjadi kenaikan harga sekitar Rp 700 per kilogram. Meski stok masih aman hingga 4 ribu ton sampai menjelang akhir tahun, tetapi kenaikan harga cukup dikeluhkan warga.

Disperindag Semarang, mengungkapkan, harga minyak goreng curah di awal Agustus rata-rata berkisar Rp 8.760. Namun, mencapai awal minggu kedua, harga melompat menjadi Rp 9.440 per kilogram. Tetapi Kepala Seksi Bina Pasar Disperindag Semarang, Kumarsi, tidak membantah jika proses lonjakan harga tidak luput dari imbas meroketnya permintaan minyak goreng menjelang Ramadhan dan Idul Fitri mendatang.

Sementara itu, Disperindag Kabupaten Lebak belum lama ini akhirnya menggelar operasi pasar (OP) minyak goreng dalam kemasan seharga Rp7.800 untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan kecil. Sebab saat ini harga minyak goreng di wilayah ini sudah mencapai Rp 9.500 per liter. Sejak menjelang ramadhan,

harga sudah mulai merangkak naik. Dipastikan harga minyak goreng ini akan terus melesat menjelang Idul Fitri.

Menurut Kepala Disperindag Kabupaten Lebak Wawan Ruswandi, OP minyak goreng menyebarkan 2 ton minyak goreng kemasan yang dibagi untuk dua titik yakni Sampay Warunggunung dan Pasar Rangkasbitung. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dari Pemda dan distributor setempat.

Dari Surabaya juga dilaporkan harga minyak goreng sejak sebelum Ramadhan sudah menunjukkan gejala kenaikan. Saat ini harga minyak goreng di wilayah ini sudah mencapai Rp 9.500 per kilogram, padahal harga normal hanya sekitar Rp 8.500 per kilogram. Manado pun mengalami gejala yang sama. Saat ini harga minyak goreng di wilayah ini sudah meroket menjadi Rp 9.750 per kg dari harga sebelumnya Rp 9 ribu per kg.

Sementara di wilayah DKI Jakarta, antrian warga untuk membeli minyak goreng murah ternyata jauh lebih padat ketimbang antrian peminat sembako. Menurut Kepala Suku Disperindagkop, UMKM dan Perdagangan, Jakarta Barat, Tati Budiarti, mengatakan, minyak goreng jauh lebih diminati dibanding paket sembako. OP yang digelar di wilayah ini antara lain mengedarkan minyak goreng dengan harga Rp 7.500 dengan kualitas yang jauh lebih baik dari minyak goreng curah di pasaran yang harganya saat ini mencapai kisaran Rp 9.000 per liter. ▲

Harga Karet

Terus Meroket

Karet ternyata juga menunjukkan aksi estafet yang menunjukkan gejala meroketnya harga. Harga karet memang kembali menanjak hingga ke level tertinggi selama lima pekan terakhir. Kondisi ini antara lain disebabkan berkurangnya persediaan di Jepang, lonjakan harga minyak mentah, apresiasi mata uang negara eksportir utama dan melorotnya volume pasokan.

Dari Tokyo dilaporkan, kontrak karet naik sebesar 2,3 % hingga ke level tertinggi sejak 28 Juni. Harga Juli lalu juga sudah meningkat sebesar 1,3 %. Data stok karet dari Tokyo Commodity Exchange (Tocom) turun 22 % menjadi 1.042 metrik ton periode 20 Juli dan merupakan level terendah sejak 2001. Untuk kontrak pengiriman Januari, harga karet menanjak 6,4 % menjadi 285,9 yen per kilogram (US\$3.305 per ton) sebelum akhirnya ditransaksikan di level 281,2 yen. Untuk kontrak Agustus, naik 1,9 % menjadi 316,7 yen.

Harga minyak mentah dunia yang kian melesat dahsyat hingga mencapai US\$81 per barel, juga turut mendongkrak harga karet.

Ketatnya suplai dari negara-negara produsen utama ketika permintaan membunyah dari China, India dan Malaysia, yang berkontribusi 47 % terhadap konsumsi global juga semakin mengusung kekuatan harga komoditas ini.

Dapat dimaklumi, konsumsi karet alam China naik 28 % pada periode Januari-Mei 2010. India pun melonjak sebesar 11,3 % dan Malaysia naik 11,4 %. Sementara pasokan karet di pasar global juga nampak kurang subur dari proyeksi sebelumnya. Hanya tumbuh sebesar 5,2 % atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 6,3 %.

Produksi Thailand turun 13,3 % karena musim hujan, India sepanjang 2010 diproyeksikan produksinya turun 10.000 ton menjadi 885.000 ton. Harga karet di negara gajah putih ini pun naik 0,2 % menjadi 104,15 baht (US\$3,23) per kg. ▲

Harga Emas

Tetap Panas

Meski sempat tertekan setelah terapresiasi dolar AS, emas tetap menunjukkan pertahanan harga yang panas. Harga kontrak emas memang sedikit terendam, setelah sebelumnya terus mencatat prestasi berkilauan yang begitu lama sejak November 2009.

Harga kontrak berjangka emas untuk pengiriman Desember ditutup turun US\$2,70, atau 0,2 %, menjadi US\$1.202,60 per ounce pada 1:40 di Comex New York. Harga menguat 3,7 % dalam delapan sesi sebelumnya, penguatan terpanjang sejak akhir November. Kontrak paling aktif naik 9,7 % tahun ini.

Tertahannya lonjakan harga emas juga tidak mengundang banyak kecemasan. Mengingat sebelumnya, dolar AS juga sempat terdepresiasi euro yang kemudian memicu investor kembali sibuk dengan logam mulia ini.

Sebelumnya, kebijakan China yang berencana melonggarkan peraturan perdagangan logam juga sempat menyumbang proses meroketnya harga emas. China memang telah mengumumkan akan memberikan izin bagi sejumlah bank untuk mengimpor dan mengekspor emas. Pemerintah negeri tirai bambu ini juga menyetujui pemberian akses kepada lebih banyak lagi perusahaan asing agar bisa bergabung dalam perdagangan komoditas emas. ▲

Lelang Tembakau

Bremen Pindah ke Deli

Lelang tembakau Deli yang sudah diselenggarakan selama ratusan tahun di Bremen, Jerman, pada bulan September 2010, ini, akan dipindahkan ke Deli, Sumut. Sedangkan tempat penjudulan tembakau Deli yang selama ini dilakukan di Bremen, difungsikan sebagai etalase tembakau yang akan dilelang.

Dirut PT PTPN II, Tanjung Morawa, Sumut, Bhatara Moeda Nasution, mengatakan, selain untuk efisiensi, lelang tembakau di Sumut itu diharapkan mendatangkan pembeli yang lebih banyak dari jumlah peserta lelang di Bremen yang sebagian besar hanya berasal dari Eropa.

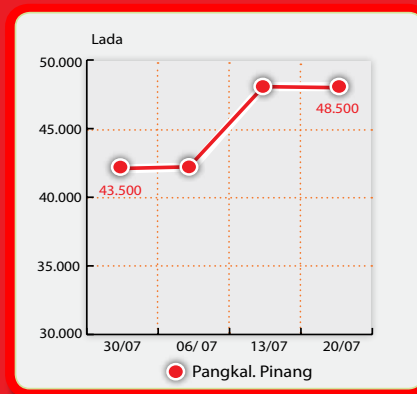
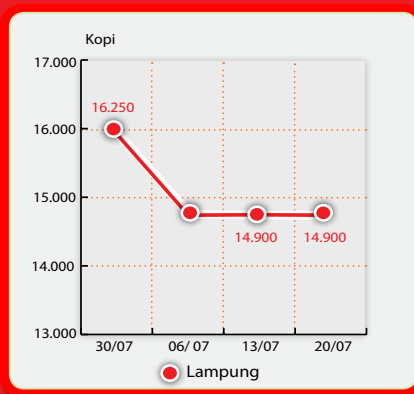
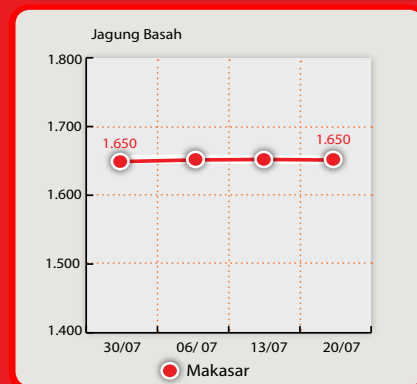
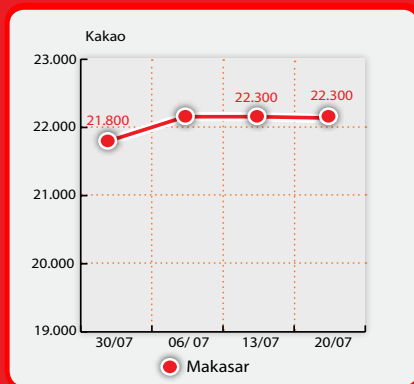
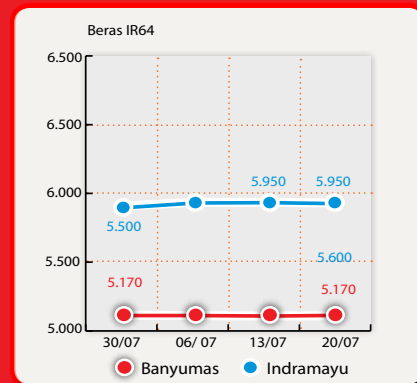
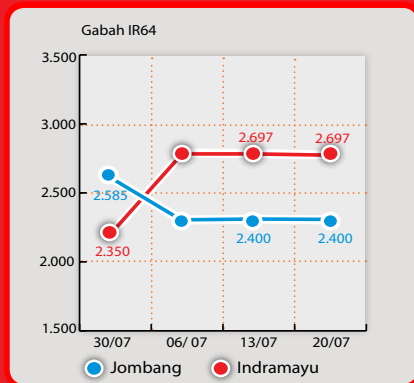
"Biaya lelang tembakau termasuk untuk ongkos dan lain-lain di Bremen itu bisa mencapai Rp 5 miliar - Rp 6 miliar dari nilai jual yang sekitar Rp 30 miliar. Kalau lelang di Sumut, biaya itu 'kan bisa ditekan,'" ujar Bhatara.

"Pada bulan September, kata Bhatara, agen pembeli tembakau Deli yang dilelang selama ini di Bremen, akan datang ke Sumut melihat langsung tembakau Deli yang akan dilelang."

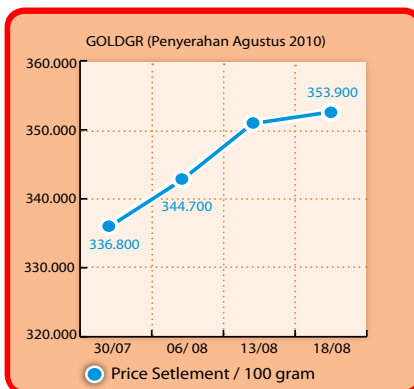
"Gudang tembakau Deli yang siap lelang sudah dibangun di Kebun Tandem. Diperkirakan selesai dalam waktu dekat. Dan pada September 2010, akan dilakukan lelang untuk tahun 2011, dari hasil tanam 2010 yang seluas 500 ladang atau setara 400 hektare," jelas Bhatara Moeda Nasution. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)

infoharga.bappebti.go.id



icdx.co.id



Cincau Hidangan Favorit Berbuka Puasa

Menjelang bulan puasa seperti saat ini, Cincau adalah salah satu sajian favorit berbuka puasa. Teksturnya yang kenyal menjadi santapan lezat jika dicampur dengan cendol, bermacam buah, air gula merah, susu dan ditambah es. Segar rasanya! Cincau bukan saja enak untuk disantap, komoditi ini juga berkhasiat untuk kesehatan. Jadi, sebaiknya dikonsumsi secara rutin. Cincau bisa mencegah panas dalam, hingga mampu menghajar ganasnya kanker.

Kata Cincau sendiri berasal dari dialek Hokkian, sienchau (xiancao), yang lazim dilafalkan dikalangan bangsa Tionghoa di Asia Tenggara. Cincau diasalnya, sebenarnya adalah nama tumbuhan yang menjadi bahan pembuatan gel atau agar-agar. Di tanah air, kita juga mengenal banyak nama dari Cincau ini, seperti Camcao, Juju, Kepleng (Jawa), Camcauh, Tahulu (Sunda), Daluman (Bali).

Tanaman Cincau (*Cylia barbata*) merupakan tanaman yang tumbuh merambat, berdiameter kecil dengan kulit batang kasar. Panjang batangnya mampu mencapai belasan meter, daun tanaman ini berbentuk perisai dengan tekstur berbulu atau malah licin tergantung jenisnya.

Rasa dari agar-agar cincau ini segar dan tawar, dengan aroma yang sangat khas. Beberapa jenis Cincau saat ini justru diproduksi dengan campuran aroma khas tambahan, seperti aroma dan rasa jeruk yang lebih menyegarkan. Selain lezat dan menyegarkan, Cincau juga berkhasiat antipiretik (menurunkan suhu badan atau yang populer sebagai panas dalam), dan stomakikum (merangsang nafsu makan). Karena Cincau mengandung berbagai alkaloid, yang terdapat dalam butir hijau daun.

Cincau bisa dikonsumsi sendiri dengan campuran air yang dimasak dengan santan dan gula merah, bisa pula dengan campuran berbagai macam bahan. Dalam es campur, Cincau dikonsumsi bersamaan dengan aneka buah. Biasanya buah blewah dan nangka, ditambah tapai dan bahan-bahan lain sesuai selera.



Resep tradisional untuk mengatasi beragam penyakit dengan menggunakan Cincau;

1. Panas Perut, Tekanan Darah Tinggi
Sediakan 20 helai daun Cincau hijau lalu dicuci bersih. Remas-remas, dan beri 1 gelas air minum dingin lalu disaring. Tambahkan jeruk nipis sesuai selera. Biarkan di tempat dingin sampai menjadi agar-agar. Saat mau dikonsumsi, Cincau ditaruh dalam gelas dan beri madu, atau sirup atau gula aren cair. Cincau siap diminum dan pasti tekanan darah tinggi akan pergi.
2. Disentri
Buat ramuan seperti disebutkan pada nomor satu. Minum selama seminggu berturut-turut.
3. Sariawan
Lakukan dengan ramuan seperti yang telah disebutkan pada nomor satu, selama 5 - 7 hari berturut-turut.
4. Bisul
Sediakan daun cincau hijau secukupnya. Cuci bersih kemudian dilumatkan dan ditempelkan ke bagian yang bernanah. Ini berkhasiat untuk mengeluarkan nanahnya.
5. Demam
Ambil rimpang tanaman Cincau, cuci bersih kemudian diiris halus. Rebus dengan air secukupnya. Minum ramuan tersebut setelah matang. Bisa juga rimpang tersebut diseduh dengan air panas secukupnya kemudian diminum.

Tetapi yang biasa dikonsumsi secara sendiri adalah Cincau hijau. Teksturnya lebih lembut, sementara Cincau hitam yang lebih kenyal biasanya justru lebih dinikmati dengan bahan campuran makanan lain.

Hijau-Hitam

Cincau hijau berasal dari dua jenis tanaman yang berbeda. Yakni Cincau rambat (*Cyclea barbata*) dan Cincau perdu (*Melastoma polyanthum*). Sementara Cincau hitam berasal dari tanaman *Mesona palustris* atau janggolan.

Proses pembuatan Cincau hijau, sesungguhnya sangatlah sederhana. Dilakukan dengan meremas-remas daun Cincau rambat atau perdu, sambil sedikit demi sedikit diberi air. Air hasil remasan ini disaring dan ditampung dalam wadah. Lalu ampas dibuang dan air remasan daun yang berwarna hijau gelap itu dibiarkan dalam wadah sekitar 1 - 2 jam, sampai air tadi menggumpal dan membentuk agar-agar.

Budidaya Cincau perdu sampai saat ini masih sangat terbatas. Belum dilakukan secara komersial. Di wilayah Jakarta, tanaman ini hanya dibudidayakan secara tradisional dengan menanam di tanah-tanah yang kosong. Seperti dipinggiran rel atau dibantaran sungai.

Sama pula halnya dengan Cincau rambat, dibudidayakan masyarakat secara terbatas untuk dikonsumsi di rumah-tangga, terutama sebagai bahan obat tradisional. Budidaya Cincau hijau ini sama terbatasnya dengan jumlah konsumennya. Berbeda dengan Cincau hitam yang nampak lebih populer dan lebih banyak peminatnya.

Bahan Cincau hitam berupa tanaman janggolan yang dibabat (disabit), dan

langsung dikeringkan di lokasi, atau dibawa pulang untuk dikeringkan di rumah. Setelah kering, bahan ini akan ditampung oleh tengkulak. Ada pula tengkulak yang menebas (membeli borongan) janggolan yang masih ada di ladang.

Pedagang inilah yang kemudian memanen janggolan dan mengeringkannya. Hasil panen janggolan dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama dari Blitar, seluruhnya diangkut ke kota Surakarta. Di sini janggolan digiling dan diayak (diekstrak). Hasilnya berupa serbuk cincau hitam yang kemudian dipasarkan ke seluruh Indonesia. Sehingga Cincau hitam dapat mudah ditemukan dimana saja.

Kemudian di Jakarta, ada pedagang besar, yang tiap hari mencairkan serbuk cincau dan kemudian memadatkannya untuk dipasarkan di pasar-pasar tradisional. Selanjutnya para tukang buah keliling atau restoran akan membeli potongan Cincau yang sudah dipadatkan tersebut untuk kemudian diecerkan ke konsumen.

Jalur perdagangan Cincau hitam ini sudah berlangsung selama puluhan tahun secara nasional. Beda dengan Cincau hijau yang pasarnya sangat lokal dan terbatas. Di kawasan Bogor, Jawa Barat, juga ada petani dan produsen Cincau hitam untuk pasar Jakarta, bahkan juga untuk ekspor.

Cincau bukan hanya menjadi favorit di Indonesia. Di negara-negara mapan sekaliber Jepang dan Korea, pun, Cincau diproduksi untuk konsumsi siap pakai oleh rumah tangga. Caranya, bahan baku Cincau di ekstrak menjadi bubuk atau dikemas dalam kalengan yang siap saji sebagai bahan tambahan minuman atau dessert segar.▲

Gel Pencegah Kanker

Daun tanaman Cincau ini ternyata kaya dengan klorofil atau zat hijau daun. Bila ini dikonsumsi, sangat bermanfaat untuk mencegah hipertensi, sakit perut, dan akarnya dapat bermanfaat untuk mencegah demam dengan cara diseduh dan disaring lalu diminum biasa.

Menurut penelitian para ahli, tumbuhan ini mengandung zat sejenis karbohidrat yang mampu menyerap air sehingga bisa menjadi padat, juga mengandung lemak dan lain-lain.

Selama ini masyarakat lokal secara tradisional menggunakan Cincau sebagai obat penurun panas badan, obat demam, obat panas dalam, obat sakit perut (mual), obat diare, pencegah gangguan pencernaan.

Cincau kaya akan mineral terutama kalsium dan fosfor. Cincau juga baik dikonsumsi bagi orang yang sedang menjalani diet karena rendah kalori, namun tinggi serat. Cincau dipercaya mampu meredakan panas dalam, sembelit, perut kembung, demam, dan diare. Sedangkan serat bermanfaat untuk membersihkan organ pencernaan dari zat karsinogen penyebab kanker.

Daun Cincau hijau mengandung senyawa dimetil kurin-1 dimetoidida. Zat ini bermanfaat untuk mengendurkan otot. Senyawa lain seperti isokandrodendrin dipercaya mampu mencegah sel tumor ganas. Cincau juga mengandung alkaloid bisbenzilsokuinolin dan 5,5-tetandrin yang berkhasiat mencegah kanker pada ginjal, anti radang, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Cincau juga mengandung anti oksidan dan mampu mematikan sel kanker.

Potensi Cincau juga diuji dengan cara dipaparkan pada empat jenis sel kanker, yaitu sel kanker darah (leukemia), kanker mulut rahim, paru, dan payudara.

Ekstrak daun Cincau ternyata mampu secara menghajar sel kanker darah (leukemia) sebesar 55-90 persen. Sementara kemampuan Cincau membunuh sel kanker lain sekitar 60 persen. Itu artinya, Cincau hijau mengandung komponen bioaktif pembunuh sel kanker dan menghalau senyawa-senyawa berbahaya pemicu kanker.

Cincau hijau juga memiliki khasiat mengendalikan hipertensi atau

penyakit darah tinggi. Zat-zat yang terkandung dalam cincau hijau dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat-obatan, di samping digunakan sebagai minuman penyegar.

Tanaman yang bernama latin *cyclea barbata* dan termasuk dalam suku sirawan-sirawanan (*Menispermaceae*) ini daunnya telah diteliti mengandung karbohidrat, polifenol, saponin, flavonoida dan lemak. Kalsium, fosfor, vitamin A dan B juga ditemukan dalam daun Cincau hijau.

Selain itu, kandungan serat di dalam Cincau juga sangat tinggi. Penelitian yang dilakukan Direktorat Gizi Departemen Kesehatan terhadap Cincau mengungkapkan terdapat 6,23 gram per 100 gram kandungan serat kasar dalam gel Cincau.

Ini berarti, bila Cincau dikonsumsi bersama dengan buah dan sayur mayur sehari-hari bisa memadai untuk memenuhi kebutuhan serat harian sebesar 30 gram sehingga bisa membantu memerangi penyakit degeneratif seperti jantung koroner. Sementara itu kalori yang terkandung di dalamnya adalah 122 kalori dan protein sebesar 6 gram.▲

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG

SISTEM RESI GUDANG merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan, karena Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi para petani dan dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Implementasi Sistem Resi Gudang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi para pemilik komoditi yang memanfaatkan sistem ini untuk memperoleh pembiayaan, tetapi juga bagi para pelaku/lembaga yang berperan aktif dalam Sistem Resi Gudang.

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

Untuk menjaga integritas SRG, Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang harus memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas (Bappebti) sebagai berikut:

PERSYARATAN PENGELOLA GUDANG

Pengelola gudang dalam SRG harus merupakan Badan Usaha Berbadan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2001 dan Nomor 11/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009, yaitu :

- | | |
|--|---|
| <p>A. Perseroan Terbatas (PT)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); b. Mempertahankan kekayaan bersih paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 15% (lima belas persen) dari nilai komoditi yang dikelola; c. Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik; d. Menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat Persetujuan dari Bappebti; e. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu; f. Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang. | <p>B. Koperasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); b. Mempertahankan kekayaan bersih paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 15 % (lima belas persen) dari nilai komoditi yang dikelola; c. Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik. d. Menguasai paling sedikit 1 (satu) gudang yang telah mendapat Persetujuan dari Bappebti; e. Memiliki pedoman operasional baku yang mendukung kegiatan Operasi sebagai pengelola gudang; f. Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang; g. Memiliki rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam menilai Kredibilitas koperasi di tempat kedudukan (domisili) koperasi. |
|--|---|

PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN

Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Gudang disampaikan oleh Direksi Perseroan Terbatas atau Pengurus Koperasi kepada Kepala Bappebti melalui Surat dengan menggunakan kop surat perusahaan atau koperasi berpedoman pada Model Formulir Nomor SRG-PG01 serta melampirkan:

- Daftar kelengkapan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan sebagai Pengelola Gudang (Lampiran 1 dari Model Formulir SRG-PG01);
- Daftar isian permohonan persetujuan sebagai Pengelola Gudang (Lampiran 2 dari Model Formulir SRG-PG01);
- Daftar pertanyaan integritas Direksi Perseroan Terbatas /Pengurus Koperasi (Lampiran 3 dari Model Formulir SRG-PG01);
- Daftar isian kelengkapan Pengelola Gudang (Lampiran 4 dari Model Formulir SRG-PG01);

Sedangkan dokumen-dokumen yang perlu disertakan dalam proses Pengajuan Persetujuan sebagai Persetujuan sebagai Pengelola Gudang, adalah

- Fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas/ Koperasi beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas/Koperasi;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perseroan Terbatas/Koperasi;
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas/Koperasi;
- Profil Perseroan Terbatas/Koperasi yang berisi status, deskripsi bisnis, landasan hukum, ekuitas, alamat, pengurus, jasa yang diberikan, visi dan misi, jumlah pekerja, jumlah gudang yang dikuasai, dan alamat kantor cabang;
- Sertifikat Manajemen Mutu untuk Perseroan Terbatas atau Pedoman Operasional Baku untuk Koperasi yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
- Rencana usaha Perseroan Terbatas/Koperasi 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem pengawasan intern;
- Perjanjian standar yang dipergunakan sebagai Perjanjian Pengelolaan Barang;
- Fotokopi Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, atau tanda

terima pengajuan permohonan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Daftar nama dan data anggota Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, atau Pengawas dan Pengurus Koperasi, dan pegawai yang berhak menandatangani Resi Gudang termasuk spesimen tanda tangannya, meliputi:
 - Daftar riwayat hidup;
 - Fotokopi ijazah pendidikan formal di bidang Sistem Resi Gudang;
 - Fotokopi Surat Kuasa/pengutusan yang memberikan kewenangan untuk menandatangani Resi Gudang;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor
 - 2 (dua) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm
- Neraca pembukaan yang dibuat paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan permohonan atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, serta keterangan tentang modal dasar dan bukti modal disetor;

Surat permohonan beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop tertutup (ukuran folio) dan ditujukan kepada Bappebti.

Hak Nasabah Pada Pialang Pailit

Dalam Kasus Penyalahgunaan Rekening Terpisah

• Amser Irawan Panjaitan • Staf Bappebti •

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah. Konsekuensinya, pialang berjangka menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dalam melakukan kegiatan itu, Pialang Berjangka wajib menempatkan margin nasabah secara terpisah dari kekayaan perusahaan Pialang Berjangka di Rekening Terpisah (segregated account).

Fungsi Rekening Terpisah antara lain, untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis Nasabah bersangkutan.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu perusahaan. Selain itu, modal yang dimiliki oleh perusahaan juga berpengaruh terhadap perusahaan, termasuk didalamnya Pialang Berjangka. Pada umumnya modal perusahaan sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya berupa pinjaman dari bank baik dengan jaminan (collateral) maupun tanpa jaminan, ataupun cara lain yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku, yang memungkinkan Pialang Berjangka menghadapi banyak permasalahan penyelesaian utang piutang

dalam melaksanakan kegiatannya.

Pialang Berjangka yang sebagian modalnya diperoleh dari pinjaman institusi keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non-bank akan selalu dihantui oleh keadaan, dimana Pialang Berjangka tidak dapat membayar pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Para Pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian. Pialang Berjangka yang tidak dapat membayar pinjaman merasa khawatir dan masalah terjadi ketika Pialang Berjangka menyalahgunakan dana yang terdapat dalam Rekening Terpisah untuk membayar pinjaman. Pialang Berjangka yang tidak membayar pinjaman dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh bank sebagai salah satu kreditor ataupun kreditor lainnya di Pengadilan Niaga.

Ini sangat berbeda sekali dengan bank, dimana permohonan pernyataan pailit atas bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI), begitu juga perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bappepam-LK, serta perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak dalam kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pialang Pailit

Pengadilan Niaga dapat memutuskan Pialang Berjangka dinyatakan pailit apabila Pialang Berjangka terbukti secara

sederhana mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih dan menunjuk Kurator.

Kepailitan mengakibatkan debitor, dalam hal ini Pialang Berjangka, kehilangan haknya untuk menguasai, mengurus, dan/atau mengalihkan kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sehingga orang yang memiliki hak tersebut adalah Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Semua kreditor mengajukan tagihan kepada Kurator. Permasalahan yang dapat terjadi adalah apakah Nasabah yang mempunyai dana dalam Rekening Terpisah Pialang Berjangka dan dana tersebut telah disalahgunakan oleh Pialang Berjangka, serta mengakibatkan kerugian kepada Nasabah tersebut mempunyai hak tagih kepada Kurator.

Pengertian kreditor apabila dilihat dalam Pasal 1 butir (2) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sehingga, Nasabah Pialang Berjangka dapat dikategorikan sebagai Kreditor. Karena UU terutama Pasal 51 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK).

Dimanakah kedudukan Nasabah pada Pialang Berjangka yang dinyatakan Pailit dalam tingkatan kreditor yang ada?

Dalam kepailitan yang termasuk kreditor adalah kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor

preferen. Kreditor separatis adalah kreditor dengan hak mendahului terhadap seluruh aset yang dahulu dijadikan jaminan kebendaan (secured creditor), contohnya Pemegang Gadai, Hipotik, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan. Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Hak istimewa mengandung arti "hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerduta, sedangkan yang terakhir Kreditor Konkuren adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka. Ketentuan tersebut juga dinamakan prinsip 'paritas creditorium'.

Kreditor Konkuren

UU No. 32 Tahun 1997 dan UU No. 37 Tahun 2004 tidak menentukan secara jelas kedudukan Nasabah dalam tingkatan kreditor, apakah yang didahulukan pembayarannya atau tidak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 begitu juga Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerduta tidak menentukan kedudukan kreditor bagi Nasabah Pialang Berjangka, sehingga Nasabah dapat dikategorikan sebagai Kreditor Konkuren yang mendapat pembayaran secara pari passu dan pro rata setelah kreditor separatis dan kreditor preferen (istimewa) yang berarti mendapat pembayaran dari sisa pembagian harta pailit setelah kreditor separatis dan

kreditor preferen. Hal ini tentu saja sangat merugikan Nasabah karena dana Nasabah dalam Rekening Terpisah bukanlah milik Pialang Berjangka, tetapi murni milik Nasabah yang dikelola oleh Pialang Berjangka dan dana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta pailit yang dapat digunakan sebagai alat bayar oleh Pialang Berjangka untuk membayar segala hutangnya terhadap pihak ketiga atau kreditornya.

UU No. 37 Tahun 2004 belum mengatur upaya hukum yang dapat dipergunakan para Nasabah pada Pialang Berjangka yang dinyatakan pailit dan belum ada aturan yang mengakomodasi kepentingan Nasabah Pialang Berjangka yang dinyatakan pailit, sehingga perlindungan hukum bagi Nasabah Pialang Berjangka masih lemah walaupun kepailitan Pialang Berjangka sebenarnya telah diatur cukup jelas dalam Pasal 51 ayat (6) UU No. 32 Tahun 1997 mengenai dana Nasabah yang berada dalam Rekening Terpisah dalam Pialang Berjangka yang telah dinyatakan pailit, yaitu dana milik Nasabah yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka terhadap pihak ketiga atau kreditornya.

Peran Bappebti

UU No. 32 Tahun 1997 tidak meng-cover suatu peristiwa, yakni Pialang Berjangka telah menyalahgunakan dana Nasabah dalam Rekening Terpisah yang dikelolanya, dimana dana tersebut seharusnya hanya dapat digunakan untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang

bersangkutan (Pasal 51 ayat (5) UU No. 32 Tahun 1997) dan dana kompensasi tidak cukup membayar kerugian Nasabah, serta Pialang Berjangka tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang.

Bagi pihak yang menyalahgunakan fungsi rekening terpisah diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.500.000.000, tetapi pengaturan tersebut membutuhkan proses panjang sampai dengan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (in kracht) dan dapat dieksekusi dibandingkan kepailitan.

Pasal 6 butir (N) UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK telah memberikan kewenangan khusus kepada Bappebti sebagai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka untuk mengatur ketentuan lebih lanjut tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit.

Berdasarkan kewenangan di atas, Bappebti dapat membuat peraturan yang berkenaan dengan dana Nasabah dalam perusahaan Pialang Berjangka yang telah dinyatakan pailit dan bagaimana kedudukan Nasabah dalam tingkatan Kreditor yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sejalan dengan fungsi Bappebti sebagai badan pengawas yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 32 Tahun 1997 yang bertujuan agar adanya perlindungan hukum bagi Nasabah.

Perlindungan Nasabah (consumer protection) memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan Perdagangan Berjangka di dunia, terutama di Indonesia, sehingga dengan adanya perlindungan bagi Nasabah yang baik dan mempunyai kepastian hukum diharapkan dapat menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.▲



Dominggus Alexander

Ambisi Trader Sukses

Coba-coba mengadu peruntungan di bidang perdagangan berjangka, setelah menyabet gelar Sarjana Peternakan, dari Univ. Udayana, Denpasar, Bali, 1989, Alexander Dominggus, langsung jatuh cinta pada bidang ini. Dan, dia pun berambisi sebagai trader sukses yang bisa melipatgandakan keuntungan para investornya.

"Saya mengenal industri perdagangan berjangka di Denpasar, Bali, sejak tahun 1991. Saat itu, kita mengenalnya dengan sebutan commission house. Untuk pertama kalinya, saya bergabung dengan divisi commission house salah satu bank papan atas saat ini. Cukup lama juga saya di situ, sekitar 6 tahun," jelas Direktur Kepatuhan PT Internasional Mitra Futures (IMF).

Kemudian, lanjutnya, pada tahun 1996, saya bergabung dengan perusahaan commission house di Surabaya, Jatim. "Mendengar praktik commission house dianggap ilegal oleh pemerintah, dan disaat yang sama saya juga dapat informasi bahwa akan ada perusahaan pialang yang akan berdiri di Denpasar-IMF, maka saya memutuskan bergabung dengan perusahaan tersebut."

"Saya bergabung dengan IMF sejak tahun 2004, dengan jabatan Manager Marketing," kisah pria kelahiran Kupang, NTT, 14 Januari 1962, ini.

Saat ini, suami Margareta- gadis

Jogjakarta, yang dinikahinya pada tahun 1994, itu, hingga kini didaulat menjadi Direktur Kepatuhan IMF, sejak tahun 2007.

"Loh, kok bisa sejak tahun 2007? Kebijakan direktur kepatuhan perusahaan pialang berjangka 'kan baru keluar pada tahun 2009.

"Manajemen IMF sangat menyadari bahwa bisnis ini penuh dengan risiko, dan tidak tertutup kemungkinan akan ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oknum perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, dibentuklah divisi complaint. Dan, saya ditunjuk sebagai manager-nya," terang ayah dari dua anak ini.

IMF berdiri di Denpasar, Bali, pada tahun tahun 2004. Dan, dalam perjalanannya IMF memiliki 3 cabang, masing-masing di Solo, Semarang, Jateng dan Jogjakarta. "Hingga pada tahun 2008, ada pengetatan peraturan dari otoritas perdagangan berjangka, dan para pemegang saham IMF pun segera melakukan rasionalisasi. Kantor pusat di Denpasar, ditutup dan dipindahkan ke Jogjakarta. Sedangkan kantor cabang Solo dan Semarang pun ditutup," jelas Alex.

Mengapa pilih Jogjakarta sebagai kantor pusat IMF?

Menurut ayah dari Miranda Alexandra kelas 1 SMP dan Yosua

Alexandro, kelas 4 SD, karena kota Jogja memiliki potensi besar. "Semula orang mengenal Jogja sebagai kota pelajar dan tujuan wisata, tetapi kini Jogja sudah menjadi kota investasi."

"Pergeseran animo itu sudah mulai dirasakan sejak tahun 1997, pebisnis dari Jakarta memilih daerah seperti Jogja sebagai pengembangan usaha. Dan itu terbukti, dari total volume transaksi IMF sebelumnya, Jogja selalu unggul, bahkan mengalahkan Bali. Oleh karena itulah Jogja dipilih sebagai basecome IMF saat ini," papar Alex.

"Di samping itu, segmen terbesar investor IMF adalah dari kalangan pebisnis dan produk yang mereka suka kontrak forex dan indeks," tambahnya.

Terkait dengan kebijakan otoritas perdagangan berjangka akan adanya minimum transaksi multilateral sebesar 5 persen dari total transaksi OTC, Alex mengaku cukup optimis.

"Saya pikir kami akan mampu memenuhi dan bahkan bisa melampaui dari ketentuan tersebut. Selama ini perusahaan pialang kurang berminat menawarkan kontrak berjangka komoditi karena infrastrukturnya yang belum memadai. 'Nah, kita sudah mendengar akan ada sistem perdagangan yang baru dari bursa, pastinya kami akan mendukung dan berupaya keras bisa mengembangkan pasar ini. 'Toh, kalau bursa maju, pialang juga pasti ikut maju,' papar Alex. ▲